

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia, di mana globalisasi menawarkan banyak hal pembaruan dalam segala bidang, mulai dari sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Syafriyani, 2019). Pada era globalisasi yang saat ini terjadi dan berkembang dipengaruhi oleh laju gerak globalisasi yang berlangsung cepat dan luas, oleh Schotle (1997) globalisasi dipengaruhi oleh 4 faktor utama di antaranya yaitu *rationalism* (rasionalitas), *capitalism* (kapitalisme), *tehnological innovation* (inovasi teknologi), dan *regulation* (regulasi). Pada faktor inovasi teknologi mendorong kemajuan infrastruktur salah satunya yaitu dalam hal komunikasi adalah kemunculan internet. Munculnya internet kemudian mendorong lahirnya era revolusi 4.0. Era Revolusi 4.0 merupakan era di mana segala kehidupan mulai dari tingkat sipil, pemerintah hingga negara mampu mengoptimalkan keuntungan dengan pemanfaatan platform digital. Pelayanan publik merupakan salah satu bidang pemerintahan yang masuk dalam perkembangan digitalisasi (Syafriyani, 2019).

E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Fajriyani, et al., 2020 dalam Mukhsin, 2020). *E-Government* memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi dan menerima layanan dari pemerintahan lokal, daerah, maupun pusat dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus memakan banyak biaya dan waktu untuk melakukan pelayanan (Palvia, et. al., 2007 dalam Mukhsin, 2020). Perubahan pelayanan pemerintah di Indonesia berbasis *E-Government* di dorong dengan peningkatan jumlah penggunaan internet di Indonesia yang

berkembang sangat pesat mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023 dari total populasi yang sebesar 275,78 juta jiwa, data tersebut berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,67% jika dibandingkan dengan penggunaan internet pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Peningkatan jumlah tersebut membantu dalam menunjang pelayanan publik berbasis digital.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat (Dewi, 2020). Perkembangan teknologi informasi salah satunya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pentingnya data kependudukan merupakan salah satu informasi yang berguna untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan (Hastuti, 2020). Pada era digital data kependudukan merupakan data yang sangat penting sehingga wajib disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya (kominfo.go.id, 2018). Pemanfaatan data kependudukan harus diikuti dengan adanya regulasi yang jelas mengenai keamanan kepemilikan data kependudukan penduduk (Karunia dan Jamin, 2023).

Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan pelayanan berbasis digital pada administrasi kependudukan, meluncurkan sebuah inovasi yang bernama Identitas Kependudukan Digital. Direktur Jendral (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa dengan pergeseran KTP-el fisik ke KTP-el digital, kebutuhan akan KTP-el fisik akan berkurang sehingga negara mampu menghemat Rp. 50-100 miliar per tahun. Terdapat tiga syarat diberlakukannya KTP Digital yaitu ketersediaan jaringan internet, kemampuan mengoperasikan smartphone, dan memiliki smartphone (disdukcapil.tegalkab.go.id, 2022). Berdasarkan pada Permendagri No.72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi

Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, IKD (Identitas Kependudukan Digital) merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. Inovasi ini dikembangkan oleh pemerintah guna membantu dalam integrasi data kependudukan, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik dan privat dalam bentuk digital, dan pengamanan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data (disdukcapil.labura.g.id, 2023).

Manfaat dari adanya Identitas Kependudukan Digital merupakan sebuah reformasi birokrasi, penerapan sistem Identitas Kependudukan Digital untuk menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan. Dikarenakan KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pembuatan Identitas Kependudukan Digital lebih cepat, tidak diperlukan pencetakan menggunakan blanko, tidak perlu disimpan dalam dompet, meminimalisir kehilangan KTP dalam dompet (Dirjen Dukcapil, Kemendagri). Identitas Kependudukan Digital yang merupakan terobosan di tengah era digitalisasi, yang akan memuat berbagai fitur di dalamnya yaitu dokumen Kartu Keluarga (KK), NPWP, sejarah vaksinasi Covid-19, Kartu BPJS, informasi kepemilikan kendaraan, informasi BKN, serta Daftar Pemilih Tetap tahun 2024. Adanya Identitas Kependudukan Digital nantinya akan mempermudah akses di berbagai pelayanan publik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu lagi melakukan *fotocopy*, hanya dengan *scan* kode batang (*barcode*) (Jatengprov.go.id, 2023).

Identitas Kependudukan Digital yang di resmikan dan diuji coba pada pertengahan 2022, mendorong sejumlah daerah di Indonesia untuk menerapkan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital. Provinsi Jawa

Tengah turut serta dalam melakukan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital, terdapat 35 kabupaten/kota yang melakukan implementasi Identitas Kependudukan Digital di antaranya yaitu Kabupaten Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo. Persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.1 Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Jawa Tengah Februari Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Persen IKD	Target
1	Kabupaten Temanggung	85,97%	30%
2	Kota Magelang	78,05%	30%
3	Kota Surakarta	46,22%	30%
4	Kabupaten Wonogiri	27,74%	30%
5	Kabupaten Purworejo	27,09%	30%

Sumber: Penyajian Data Agregat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Data di atas menunjukkan persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Jawa Tengah. Dari 5 besar persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Wonogiri menempati peringkat 4 yaitu dengan persen Identitas Kependudukan Digital yaitu 27,74% yang mana masih belum mencapai target capaian nasional 30%. Kabupaten Wonogiri telah melakukan berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase Identitas Kependudukan Digital, melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik, pelayanan di Kantor Kecamatan, serta melakukan Jemput Bola, akan tetapi hal tersebut belum secara maksimal mampu dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan digital hingga mencapai target nasional yaitu 30%.

Kabupaten Temanggung berhasil mencapai persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital tertinggi yaitu 85,97% dengan melakukan pelayanan *Video Call* melalui nomor *whatsapp* yang langsung diarahkan

pada 4 nomor khusus Aktivasi Identitas Kependudukan Digital pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. Kota Magelang dengan pencapaian persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital mencapai 78,05% melakukan upaya pelayanan *online* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Kota Surakarta melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital mencapai persentase layanan 46,22% upaya yang dilakukan yaitu jemput bola yang diselenggarakan pada sore hingga malam hari, di mana pada waktu-waktu tersebut cukup efektif dalam mengumpulkan masyarakat.

Kabupaten Wonogiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.072.582 jiwa terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa pada tahun 2024 menurut buku data kependudukan Kabupaten Wonogiri. Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Wonogiri yang tersebar di 25 kecamatan masih terdapat beberapa kecamatan belum mencapai batas minimal persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu 30%. Persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital pada 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.2 Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan pada 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

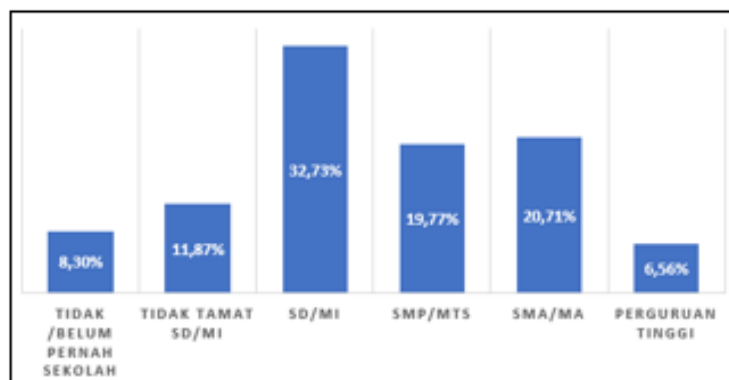
No	Kecamatan	Persen IKD
1	Pracimantoro	20,61%
2	Giritontro	15,62%
3	Giriwoyo	24,31%
4	Batuwarno	49,12%
5	Tirtomoyo	25,44%
6	Nguntoronadi	32,71%
7	Baturetno	48,12%
8	Eromoko	17,16%
9	Wuryantoro	23,85%
10	Manyaran	17,23%
11	Selogiri	26,09%
12	Wonogiri	23,07%
13	Ngadirojo	24,44%
14	Sidoharjo	19,67%
15	Jatiroto	30,49%
16	Kismantoro	40,91%
17	Purwantoro	22,01%
18	Bulukerto	17,56%
19	Slogohimo	45,97%
20	Jatisrono	30,26%
21	Jatipurno	36,41%
22	Girimarto	14,64%
23	Karangtengah	49,07%
24	Paranggupito	43,57%
25	Puhpelem	18,60%

Sumber: Penyajian Data Agregat Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Data tabel di atas menggambarkan 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri ikut dalam melaksanakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Tiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri memiliki persentase aktivasi kurang dari dibawah 20% hingga tertinggi mencapai persentase berkisar 40%. Dari 25 Kecamatan sebanyak 15 Kecamatan masih memiliki persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di bawah 30%, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri belum maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam upaya melakukan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital telah melakukan jemput bola layanan Identitas Kependudukan Digital di *Event Car Free Day*, Kantor Desa, dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Jemput Bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami kendala dikarenakan Sumber Daya Manusia masyarakat desa di Kabupaten Wonogiri rendah. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektual suatu masyarakat. Pendidikan masyarakat di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada table berikut.

Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2020

Pada data grafik penduduk menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas menunjukkan persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 32,73% terdapat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas belum pernah mengenyam pendidikan 8,37% dan sebesar 11,87% penduduk bersekolah

di SD/MI namun tidak tamat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin tinggi pula kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh masyarakat. Sajian data tersebut di atas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang kurang akan berpengaruh terhadap melek digital, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum paham terhadap Identitas Kependudukan Digital.

Identitas Kependudukan Digital seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2022 bertujuan mendorong digitalisasi dalam Identitas Kependudukan dimana memfasilitasi peralihan dari KTP-el fisik ke Identitas Kependudukan Digital yang lebih mudah diakses serta nantinya dapat digunakan oleh masyarakat melalui perangkat elektronik seperti handphone. Mendukung upaya pemerintah dalam transformasi digital nasional (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE, Identitas Kependudukan Digital merupakan upaya yang dibuat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi layanan publik dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan efisiensi serta fleksibilitas dalam penggunaan identitas kependudukan untuk berbagai layanan publik dan swasta tanpa harus membawa KTP-el fisik. Memungkinkan integrasi data kependudukan digital dengan sistem informasi yang dikelola pemerintah serta memudahkan sinkronisasi data dan mempercepat verifikasi identitas dalam layanan publik. Identitas Kependudukan Digital juga mendukung fitur keamanan yang ada dalam Identitas Kependudukan Digital yaitu berupa otentikasi dan enkripsi untuk melindungi data pribadi warga negara.

Pada faktanya wilayah di Kabupaten Wonogiri yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri masih memiliki persentase Identitas Kependudukan Digital di angka 27,74% belum mencapai target dari kepemilikan nasional ditahun 2024 yaitu 30%. Hal tersebut menggambarkan kondisi dari pencapaian persentase Identitas

Kependudukan Digital belum seperti di wilayah Temanggung, Magelang dan Surakarta yang mampu mencapai target nasional lebih dari 30%. Peralihan KTP-el fisik di Kabupaten Wonogiri belum mampu berjalan dengan baik karena di 15 kecamatan dari 25 kecamatan masih memiliki persentasi kepemilikan dibawah 30% hal tersebut menghambat transformasi digital yang dilakukan dan belum mampu mendorong pemerintahan di Indonesia menuju SBPE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Di Kabupaten Wonogiri Identitas Kependudukan Digital juga belum dapat membantu dalam hal layanan publik dan swasta menggantikan KTP-el fisik, hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih memilih membuat Kartu Tanda Penduduk dengan dicetakkan pada blangko, dibandingkan dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital. Integrasi data kependudukan di Identitas Kependudukan Digital belum sepenuhnya update dan tersinkronisasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

1.2 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini ada pada fokus penelitian, yang mana penelitian terdahulu belum ada yang membahas terkait dengan Identitas Kependudukan Digital, sehingga belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas terkait dengan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital. Hal tersebut menunjukkan kebaharuan penelitian yang menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital dengan pendekatan oleh Donald Van Meter dan Carel Van Horn melalui pendekatan kualitatif deskriptif.

1.3 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.3.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis menyimpulkan bahwa identifikasi masalah pada Implementasi Kebijakan Identitas

Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Wonogiri belum memiliki support pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
2. Integrasi data kependudukan di Identitas Kependudukan Digital belum tersinkronisasi dengan baik.
3. Beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri masih memiliki persentase aktivasi Identitas Kependudukan Digital dibawah 30%.
4. Tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan Identitas Kependudukan Digital masih rendah.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana Hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri?

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat memecahkan masalah yang dimaksud dapat dicapai dengan baik. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis Hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Kemanfaatan teoritik penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada pengembangan bidang studi administrasi publik khususnya pada implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Kemanfaatan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dikaji dan ditindaklanjuti ulang oleh peneliti peneliti selanjutnya terkait dengan Identitas Kependudukan Digital.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sejauh ini belum dilakukan penelitian baik melalui artikel, jurnal, skripsi, maupun tesis. Namun terkait dengan teori implementasi kebijakan sudah banyak penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu, terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian. Sebagai upaya dalam menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*), maka peneliti berusaha untuk membandingkan metode penelitian, hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan tema pelayanan administrasi kependudukan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Chairul Ardani, Endang Larasati berjudul Analisis Inovasi AJI ARUM (Akta Jadi Antar Rumah) Oleh Disdukcapil Kabupaten Semarang meneliti terkait dengan pelaksanaan inovasi AJI ARUM (Akta Jadi Antar Rumah) oleh Dispendukcapil

Kabupaten Semarang serta mendeskripsikan pelaksanaan inovasi Aji Arum (Akta Jadi Antar Rumah) oleh Disdukcapil Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori yang digunakan adalah Rogers yang menjelaskan terkait dengan atribut inovasi meliputi *Relative Advantage*, *Compatibility*, *Complexity*, *Triability*, *Observability*. Hasil penelitian ini menjelaskan terjadinya peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Semarang. Faktor penghambat yang masih dialami dalam pelaksanaan layanan yaitu permasalahan jaringan, terbatasnya jumlah SDM, sarana prasarana, ketersediaan anggaran, serta indiscipliner pada pegawai. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan dan menggunakan metode kualitatif, perbedaan pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhrol Umam Hadi, Tri Yuningsih, dan Endang Larasati yang berjudul Penerapan *E-Government* Melalui Aplikasi Dukcapil Smart di Kabupaten Bantul, meneliti terkait dengan penerapan Aplikasi Dukcapil Smart Bantul. Penelitian ini menggunakan analisis dan identifikasi tiga fenomena yang memuat elemen sukses suatu penerapan *E-Government* yaitu teori *Harvard JFK School of Government* meliputi *Support*, Kerangka *Electronic Government* yang disepakati (*Capacity*), dan ketersediaan infrastruktur yang memadai (*Value*). Terdapat beberapa faktor yang menghambat aplikasi Dukcapil Smart

Bantul, yaitu belum dapat digunakan pada perangkat IOS, serta waktu layanan yang diberikan lama karena ketidaksiapan blanko dan antrian yang panjang, kualitas pada layanan aplikasi masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan, menggunakan metode kualitatif, serta aplikasi layanan kependudukan menggunakan *smartphone*. Perbedaan pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga terdapat pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Ayu Lestari, et.al yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19 meneliti terkait kendala dalam penggunaan *electronic government* yang masih membutuhkan pematangan dari pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Temuan dari penelitian yakni diperlukan upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terkait layanan *online* melalui sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah, serta dukungan sarana dan prasarana berbasis elektronik ditunjang pula dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang dapat melaksanakan *e-government*. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan, menggunakan metode kualitatif, dan terkait dengan pelayanan publik berbasis digital. Perbedaan

pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Suko Wahyono yang berjudul Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini terkait dengan implementasi pelayanan KTP dan KK dengan dilihat dari cakupan kepemilikan dokumen kepada msayarat telah berhasil dan memenuhi factor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, akan tetapi masih terkendala pada Sumber Daya yang belum mumpuni. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan dan menggunakan metode kualitatif, perbedaan pada lokasi penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh La Trifu yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini meneliti terkait implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk menunjukkan kondisi yang cukup baik berdasarkan segi komunikasi yang terjalin baik, sumber daya dalam hal bimbingan teknologi untuk sumber daya, dan disposisi dalam hal sikap loyal pegawai terhadap kebijakan. Masih kurang optimalnya pelayanan dikarenakan kurangnya tenaga operator dan faktor fasilitas yang kurang memadai. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan, menggunakan metode kualitatif, perbedaan pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwati yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP-el) di Kabupaten Sukabumi, meneliti terkait dengan pelayanan publik dalam hal sistem administrasi kependudukannya masih perlu dirapikan ke dalam satu tempat terpadu untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi memetakan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat masih terbatas pada sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan serta belum dibentuk UPTD tiap kecamatan. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan dan menggunakan metode kualitatif, perbedaan pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halik dengan judul *The Implementation of Administrative Registration on Population Migration (Case of Surabaya City, East Java Province)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti terkait dengan Pelaksanaan kebijakan pencatatan administrasi migrasi penduduk di Surabaya masih tergolong kurang baik, dan masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan mobilitas dan penduduk pendatang seringkali mengalami pelayanan yang lamban dari petugas dukcapil. Kebijakan terkait pengurusan KTP warga yang bermigrasi harus dilakukan secara tegas, karena masih banyak masyarakat yang tidak sadar administrasi kependudukan. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan dan menggunakan metode kualitatif, perbedaan pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia Maria Siwi, Jeane Mantiri dengan judul *Implementation Of Public Services In The Era Of The Covid-19 Endemy Transition At The Regional Population And Civil Registration Departement Of Tomohon City*. Meneliti terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik era peralihan endemic Covid-19 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dalam penerapan aplikasi e-Dukcapil Tomohon, dapat disimpulkan bahwa informasi pelayanan publik berbasis teknologi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon belum baik. Dilihat dari segi transparansi bahwa aplikasi e-Dukcapil belum dapat sepenuhnya membantu masyarakat dalam mendapatkan *progress* pelayanan yang jelas. Informasi yang diberikan berupa notifikasi masih terjadi kendala *error*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jika dianalisis dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terdapat adanya persamaan dan perbedaan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada bidang administrasi kependudukan, menggunakan metode kualitatif, dan terkait dengan pelayanan publik berbasis digital. Perbedaan pada topik penelitian di mana peneliti mengambil topik Identitas Kependudukan Digital, serta peneliti memilih lokasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, perbedaan juga pada inovasi yang penulis ambil yaitu Identitas Kependudukan Digital, untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan untuk menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelayanan peneliti menggunakan teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn yaitu

mencakup lima dimensi Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor.

1.7 Kajian Teori

1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi publik mempunyai pengertian yang beragam, pendekatan administrasi publik tidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja. Istilah administrasi etimologi berasal dari bahasa latin Yunani yaitu *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang berarti melayani. Dengan demikian administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Administrasi publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014), proses koordinasi dimana sumber daya dan anggota dikelola dengan baik untuk membuat menerapkan, dan menjalankan kebijakan.

Menurut Felix A. Nigro dan L Loyd G. Nigro dalam Pasolog (2010) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan (Eksekutif Legislatif, dan Yudikatif serta hubungan antara mereka.
3. Memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan merupakan sebagian dari proses politik.
4. Erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Hebert Simon dalam Pasolong (2010) membagi empat prinsip administrasi yaitu:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hierarki yang pasti.

3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan mambatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Pergeseran Administrasi Publik menurut Nicolas Henry (2014) paradigma administrasi enam pergeseran, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Paradigma 1 *The Politics - Administration Dichotomy* (1990-1926).
Menegaskan pemisahan antara politik dan administrasi. Politik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari kehendak negara, sedangkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Hal tesebut sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
2. Paradigma 2 *The Principles of Administration* (1927-1937).
Menegaskan bahwa paradigma kedua ini berfokus pada prinsip-prinsip administrasi dan dipandang dapat berlaku universal di negara mana saja, pada setiap organisasi serta setiap lingkungan sosial budaya.
3. Paradigma 3 *Public Administration as Political Science* (1950-1970).
Administrasi publik sebagai ilmu politik di sini adalah fase di mana usaha untuk menerapkan kembali hubungan konseptual administrasi dengan politik. Administrasi publik kembali kepada disiplin induknya yaitu ilmu politik.
4. Paradigma 4 *Public Administration as Management* (1956-1970).
Paradigma keempat ini menggambarkan fase pada pengembangan administrasi publik setelah administrasi sebagai politik, selanjutnya mengintegrasikan administrasi publik dengan

dengan bisnis, dan institusional serta mementingkan teori organisasi dalam administrasi publik.

5. Paradigma 5 *Public Administration as Public Administration* (1970-sekarang).

Administrasi publik sebagai administrasi publik dengan pengembangan administrasi publik yang mengintegrasikan administrasi publik, politik, dan manajemen untuk mengatasi permasalahan serta berfokus pada teori organisasi dan administrasi publik.

6. Paradigma 6 Governance, (1990 – sekarang).

Paradigma ini merupakan fase terakhir tetapi paradigma keenam tidak menggantikan paradigma kelima akan tetapi melanjutkan. Governance dilihat sebagai tanggung jawab bersama dari organisasi publik, swasta, dan non-profit. Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, di mana memiliki proses yang kompleks dan sector masyarakat memegang kekuasaan memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

Penelitian ini sesuai dengan paradigma keenam administrasi publik yaitu administrasi publik sebagai governance, karena pelaksanaan implementasi identitas kependudukan digital melalui konsep e-government merujuk pada teknologi informasi di bidang pemerintah atau lembaga publik. Tujuan dari Identitas Kependudukan digital agar hubungan dalam tata pemerintahan (governance) yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, dan responsif.

1.7.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Taufiqurokhman (2014) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Serangkaian keputusan kebijakan yang diambil seseorang atau sekelompok orang atau mewujudkan tujuan tertentu”. Menurut Thomas R. Dye (1992) kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan (*policy*) itu sendiri berguna untuk menunjukkan perilaku seseorang seperti pejabat, suatu kelompok, ataupun Lembaga tertentu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

Menurut Bridgmn dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2008) kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan (*objective*), yaitu menyangkut pencapaian publik, di mana kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal (*authoritative choice*), dikarenakan dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan ini mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis (*hypothesis*), kebijakan didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu

menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai oleh mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Menurut Said Zainal Abidin (2004), kebijakan publik mempunyai prioritas untuk diproses. Hal tersebut ditentukan oleh proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan:

1. Efektivitas, mengukur suatu alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan
2. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai
3. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada
4. Adil
5. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Tahapan Kebijakan Publik

1. Perumusan Masalah (*agenda setting*)
2. Formulasi
3. Implementasi
4. Evaluasi

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi kebijakan publik hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat terkait dengan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

1.7.3 Implementasi Kebijakan

a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan setelah pembentukan sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan penting

dalam siklus kebijakan public secara keseluruhan. Menurut Grindle dalam (Haedar, 2010) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Van Horn dalam (Tahur, 2014) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Edward III dalam (Mulyadi, 2015), “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcome* bagi masyarakat”.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam (Waluyo, 2007) bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan public, adalah mengidentifikasi *variable-variable* yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digariskan dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai *variable politik* terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Menurut Anderson (1978) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi

Implementasi merupakan proses yang dinamis yang melibatkan terus menerus usaha yang akan dicapai pada penetapan program ke tujuan keputusan yang diinginkan. Menurut Anderson dalam (Tahir, 2014) implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan, dan factor pendukung
2. Faktor eksternal yang meliputi kondisi lingkungan dan pihak terkait,

Menurut Josy Adiwisastra, keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasioanlitas, tetapi juga kemampuan pelaksanaan untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, di mana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Menurut Widodo (Pratama, 2013), menyatakan bahwa implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan public (public policy process) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalua tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian jika menghendaki tujua kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahapan implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahapan permusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan memiliki beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melakasnakan

suatu kebijakan public. Model-model implementasi kebijakan akan mempengaruhi penerimaan public terhadap suatu kebijakan. Teori-teori terkait dengan implementasi kebijakan publik dan dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Teori Mazmanian dan Sebatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variable.

- i) Independen, yaitu mudah tidaknya suatu masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori apa yang dikehendaki.
- ii) Intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hireaekis di antara Lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari Lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Sedangkan diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstitutwn, dukungan pejabattinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- iii) Dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu, pemahaman dari Lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan

dilaksanakan tersebut atau keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

b) Teori George C. Edward III

Edwards III (1980) mengemukakan bahwa dalam pendekatan studi implementasi kebijakan dilihat dari pra kondisi untuk suksesnya kebijakan dan hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni:

- i) Komunikasi, menjelaskan bahwa implementor harus mengetahui secara jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dan dapat menyosialisasikan dengan baik kepada kelompok sasaran. Keberhasilan implementor dalam menyampaikan informasi didukung oleh sumber daya manusia.
- ii) Sumber Daya, menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia harus memiliki watak dan karakteristik seperti komitmen, kejujuran, sifat dan demokratis. Sumber daya lain dapat berupa Sumber daya yang cukup dan efektif dapat membantu dalam mengembangkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.
- iii) Disposisi, menjelaskan sikap yang harus dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komunikatif, kejujuran, komitmen, cerdas, dan demokratis agar dapat membantu mengembangkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.
- iv) Struktur birokrasi, menjelaskan terkait dengan system pembagian organisasi dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintah, memiliki *Standar Operating Prosedure* (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman implementor dalam melakukan tugas dan bertindak, hal

tersebut nantinya dapat menjadikan struktur birokrasi yang efektif.

c) Teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn, merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang memengaruhi kinerja suatu kebijakan. Terdapat enam variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

- i) Sumber daya, menjelaskan implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya finansial dan waktu juga menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
- ii) Komunikasi dan kegiatan pelaksanaan, menjelaskan dalam sebuah implementasi kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain maka diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu implementasi.
- iii) Karakteristik agen pelaksana, menjelaskan bahwa karakteristik organisasi akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
- iv) Kondisi ekonomi sosial dan politik, menjelaskan sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan,

dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- v) Disposisi implementor, mencakup tiga hal penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, instansi disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

d) Teori Merilee S. Grindle

Grindle (1990) mengemukakan terdapat dua variabel besar yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- i) Isi Kebijakan (*content of policy*), terdapat beberapa poin penting di dalamnya yaitu:

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan.
- (2) *Type of benefits* (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target kelompok.
- (3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan).
- (4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah program sudah tepat disuatu lembaga. Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.
- (5) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.

- ii) Lingkungan implementasi (*context of implementation*)

- (1) *power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi

dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

(2) *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.

(3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

e) Model Charles O. Jones

Charles O Jones (1996) mengatakan implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan.

- i) Organisasi, menjelaskan bahwa pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan
- ii) Interpretasi, menjelaskan terkait dengan menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- iii) Aplikasi (penerapan), menjelaskan aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

f) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2013) mengatakan terdapat tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

- i) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) mencakup tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
- ii) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), mencakup kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan
- iii) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih, dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dalam penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, peneliti menetapkan teori yang dipakai dasar penelitian adalah Donald Van Meter dan Carel Van Horn yang mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan itu adalah mencakup lima dimensi yaitu Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas

Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri secara lebih mendalam.

Implementasi kebijakan yang digunakan yaitu teori Donald Van Meter dan Carel Van Horn merupakan pendekatan yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan teori-teori implementasi kebijakan lainnya karena menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Teori ini menekankan pada pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi. Berikut adalah penjelasan mengapa teori Van Meter dan Van Horn dianggap lebih baik:

1. Sumber Daya

Pada teori ini menekankan bahwa kebijakan yang baik harus didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif. Ketersediaan sumber daya (finansial, manusia) sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada teori ini memberikan focus pada kemampuan organisasi pelaksana yang seringkali diabaikan dalam teori lain, hal ini memastikan kesiapan operasional dan kesesuaian tugas. Struktur, kapasitas dan budaya organisasi dari agen pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Pada teori ini menyoroti pentingnya arus informasi yang lancar antar organisasi, yang sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Efektivitas komunikasi dan koordinasi antara instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat menentukan kesuksesan pelaksanaannya.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada teori ini memperhitungkan pengaruh lingkungan eksternal yang dinamis, memberikan pandangan lebih realistis terhadap implementasi. Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan diimplementasikan.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Pada teori ini memahami peran sikap pelaksana memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan. Sikap, persepsi, dan komitmen para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan.

1.8 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Kerangka berpikir merupakan penjelasan awal terhadap hal yang akan diteliti. Dibentuknya kerangka berpikir akan membuat sebuah penelitian menjadi tersistematis. Kerangka berpikir di atas menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*) terdapat berbagai kondisi yang menunjukkan bahwa Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Wonogiri belum memiliki support pelayanan publik oleh pemerintah dan swasta, integrasi data kependudukan di Identitas Kependudukan Digital belum tersinkronisasi dengan baik, beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri masih menunjukkan persentase Identitas Kependudukan Digital dibawah 30%, tingkat pemahaman terkait Identitas Kependudukan Digital yang rendah. Hal tersebut berlawanan dengan kondisi yang seharusnya terjadi (*das sollen*), yaitu Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Wonogiri memiliki support pelayanan publik oleh pemerintah dan swasta, terintegrasinya data kependudukan di Identitas Kependudukan Digital dan tersinkronisasi dengan baik, serta tiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri mencapai target pemerintah pusat, dibutuhkan pemahaman masyarakat yang baik terkait Identitas Kependudukan Digital. Dari kondisi tersebut terdapat permasalahan pada implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital tentang bagaimana implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Penulis ingin meneliti terkait dengan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan hambatan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Diharapkan hasil kajian mendalam dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terbaik untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terkait hambatan yang masih dialami dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital.

1.9 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini dipilih karena data yang akan diperoleh pada penelitian ini berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang bersumber dari informan atau sumber lain yang diteliti dan dapat dipercaya.

1.10 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2006), penelitian deskriptif adalah berusaha mendeskriptifkan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti kondisi atau hubungan yang ada, proses yang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

1.11 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada analisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagai respon dari adanya Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

1. Penelitian ini menganalisis terkait dengan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

1.12 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial akan diteliti sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini mengambil lokus penelitian di Kabupaten Wonogiri dengan dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri selaku penyelenggara implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital.

1.13 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan permasalahan pada implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang telah diuraikan pada latar belakang, dapat dirumuskan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:

1. Kualifikasi Pelaksana: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri harus memiliki kualifikasi pelaksana dengan memiliki pendidikan minimal SMA sederajat, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, terampil mengoperasikan computer dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mampu bersikap sopan, ramah, dan komunikatif, disiplin dan taat waktu pelayanan.
2. Peralatan Perlengkapan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki perlengkapan alat tulis kantor, computer dengan aplikasi SIAK, jaringan computer/koneksi internet, dan gawai pintar.
3. Pencatatan dan Pendataan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri harus melakukan pencatatan dan pendataan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah diaktifkan Identitas Kependudukan Digital.
4. Proses Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri harus melakukan verifikasi pendaftaran yang diajukan oleh pemohon,

melakukan scan kode QR yang terdapat di SIAK menggunakan handphone pemohon, serta mengirimkan kode link aktivasi Identitas Kependudukan Digital ke email pemohon.

Hambatan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:

1. Sumber Daya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri harus memiliki sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) yang kompeten, sumber daya non-manusia (*non-human resources*) seperti sumber daya finansial dan waktu sehingga dapat memberikan dukungan dalam keberhasilan implemtasi kebijakan.
2. Komunikasi dan kegiatan pelaksanaan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki koordinasi dan kerja sama antar instansi yang baik bagi keberhasilan suatu implementasi, serta ketepatan komunikasi yang diberikan kepada sasaran kebijakan, konsistensi kegiatan yang dilakukan, dan penggunaan kekuasaan/wewenang.
3. Karakteristik Agen Pelaksana: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri harus memiliki kompetensi dan ukuran staf agen, dukungan legislatif dan eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.
4. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memiliki dukungan bagi implementasi kebijakan, melihat sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan
5. Disposisi Implementor: Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Wonogiri harus memiliki tiga hal penting yaitu karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, sikap para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan.

1.14 Fenomena Penelitian

Dalam penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, fenomena penelitian yang dirumuskan oleh peneliti didasarkan pada teori dari Donald Van Meter dan Carel Van Horn yang mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan itu adalah mencakup lima dimensi yaitu Sumber Daya, Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik, Disposisi Implementor. Data terkait fenomena penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah:

Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri	1. Kualifikasi Pelaksana 2. Peralatan/Perlengkapan 3. Pencatatan dan Pendataan 4. Proses pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital	1.
Hambatan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri	1. Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia (kompetensi yang dimiliki implementor)
	2. Komunikasi dan Kegiatan Pelaksanaan	1. Ketepatan 2. Konsistensi 3. Penggunaan Kekuasaan/wewenang
	3. Karakteristik Sgen Pelaksana	1. Struktur Birokrasi (koordinasi dengan berbagai pihak) 2. Pola Hubungan

	4. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik	1. Dampak dari kebijakan (dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik)
	5. Disposisi Implementor	1. Respon Implementor (Badan Pelaksana Kebijakan) 2. Pemahaman Implementor tentang kebijakan tersebut.

1.15 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2016:225).

Dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data primer maka penulis melakukan wawancara dengan:

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
- 2) Petugas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang melayani masyarakat dalam mengurus Identitas Kependudukan Digital melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- 3) Masyarakat Kabupaten Wonogiri selaku penerima layanan Identitas Kependudukan Digital dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan pelayanan Identitas Kependudukan Digital

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer, data yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber lain dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, dapat berupa bahan pustaka, penelitian terdahulu, literatur, buku serta dapat juga data-data, dokumen, dan arsip berupa informasi tertulis terkait topik penelitian kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

1.16 Pemilihan Informan

Pada penelitian ini pemilihan informan didasarkan pada teknik purposive sampling yaitu orang yang dianggap memiliki informasi-informasi terkait materi penelitian yang dibutuhkan.

Tabel II
Informan Penelitian

No	Jabatan	Pertimbangan
1	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan implementasi Identitas Kependudukan Digital
2	Petugas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Wonogiri	Memiliki peran penting dalam hal menghadapi masyarakat secara langsung pada saat pembuatan Identitas Kependudukan Digital
3	Masyarakat Kabupaten Wonogiri	Berdasarkan purposive sampling dipilih masyarakat di Kabupaten wonogiri karena dianggap paham terkait dengan layanan Identitas Kependudukan Digital.

1.17 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017), peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dalam kemampuannya memahami metode penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrument kunci dalam penelitian, *interview guide*, dan *observasi guide*.

1.18 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 3 metode agar peneliti dapat mengumpulkan data, sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data kualitatif deskriptif guna memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah yang telah peneliti tentukan, adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. (M. Nazir, 1998:111) mengatakan, “studi kepustakaan itu sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.”

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan. (Danang Sunyoto, 2013:22) mengatakan, “studi lapangan adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.” Teknik untuk mengumpulkan data primer yang berupa studi langsung di lapangan yang meliputi:

a) Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi. (W. Gulo, 2002:116) mengatakan, “observasi merupakan suatu metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat

informasi selama penelitian itu berlangsung”. Data observasi dapat berupa deskripsi yang faktual, dan terperinci, mengenai kondisi lapangan dan juga kegiatan manusia meliputi situasi sosial di tempat kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh peneliti. Observasi lapangan penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode Wawancara. Menurut W. Gulo (2003), metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Pihak yang diwawancarai peneliti pada penelitian ini sebagai narasumber adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai narasumber/informan adalah terdiri dari:

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).
- 2) Petugas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang memiliki peran penting dalam hal menghadapi masyarakat secara langsung pada saat pembuatan Identitas Kependudukan Digital.
- 3) Masyarakat Kabupaten Wonogiri selaku penerima layanan Identitas Kependudukan Digital dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan pelayanan Identitas Kependudukan Digital.

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau yang dibuat oleh orang lain terkait dengan

penelitian. Menurut Herdiansyah (2010), studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan, serta kebijakan yang terkait dengan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

1.19 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Bikeln (1982) berpendapat bahwa, “analisis data kualitatif adalah segala upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicitakan kepada orang lain” (Moleong, 2011). Kegiatan analisis data ini sangat penting dalam pelaksanaan penelitian, karena dalam melakukan analisis data dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan dan mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Menurut Seiddel (1998) juga disebutkan proses berjalannya analisis data kualitatif, diantaranya sebagai berikut:

1. Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, agar sumber datanya dapat lebih mudah ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan dan membuat indeks dari analisis yang dihasilkan.
3. Mencari dan menemukan pola serta hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Teknik analisis data menurut Spradly, analisis data kualitatif dikemukakan oleh James Spradly pada tahun 1980. Spradly mengemukakan empat tahapan dalam analisis data pada penelitian

kualitatif, yaitu Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Analisis Domain dalam penjelasan Sugiyono (2012) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasilnya adalah gambaran umum tentang obyek yang diteliti yang sebelumnya pernah diketahui. Pada analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

b) Analisis Taksonomi (*Taxonomic Analysis*)

Analisis Taksonomi dalam penjelasan Sugiyono (2012) merupakan kelanjutan dari Analisis Domain. Domain-Domain yang dipilih oleh peneliti perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi, sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu domain-domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diuraikan secara lebih rinci dan mendalam.

c) Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Menurut Sugiyono (2012), Analisis Komponensial yang dicari untuk diorganisasikan adalah perbedaan pada domain atau kesenjangan yang kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara lanjutan, atau dokumentasi terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi, sejumlah data spesifik akan dapat ditemukan.

d) Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Theme*)

Analisis Tema Kultural, dalam penjelasan Sugiyono (2012) merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu situasi sosial/obyek penelitian, dan dinyatakan kedalam tema penelitian.

Dipilihnya analisis data Spradley oleh penulis karena sejalan dengan tahapan atau proses pada penelitian yang dilakukan, terkait dengan mengumpulkan, dan mengolah hingga menganalisis data. Analisis data yang digunakan menggunakan Aplikasi Atlas.ti Sehingga menjadi salah satu acuan dalam mengumpulkan data sampai hasil akhir dari penelitian ini.